

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aries Djaenuri, 2021, *Sistem Pemerintahan Desa*, Univesitas Terbuka, Tangerang.

Ateng Syarifudin, 2010, "*Republik Desa Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa*", PT Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Eko Murdiyanto, 2020, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta.

Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pelihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Media Buana, Yogyakarta.

Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Surakarta.

_____, 2016, *Politik Hukum Model Pembagian Kewenangan dalam Rangka Desentralisasi di Indonesia*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta.

J.H.A Logemann, 1975, *Over de Theori van Ean Stelling Staatrecht Universiatire Pers Leiden 1948*, Terjemahan Makkatutu dan Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Maidin Gultom, 2018, "*Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", PT. Afrika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Bintarto, 2018, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2012, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekamto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum, Jakarta.

Suturo Eko, M. Barori dan Hastowiyono, 2017, *Desa Baru Negara Lama*, Pascasarjana STPMD, Yogyakarta.

Padmo Wahjono, 1991, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, No.29/April 1999.

Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal

Abdul Bari, Slamet Suhartono dan Erny Herlin Setyorini, 2020, Potensi Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa di Indonesia, Jurnal Yustitia, Vol. 21, No. 1.

Abdul Fatah, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono dan Suprpto, Analisis Undang-Undang Desa, Jurnal Dialektika, Vol. 4, No. 1.

Achmad Hariri, 2020, The Politics Law Concering The Tenure of Village Head Reviewed From Constitualism Respective, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1.

Haris Mubarak dan Indra Fauzan, 2019, Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi, POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, No. 2.

I Gusti Ayu Diah Nandini, I Wayan Parsa, 2023, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 3.

Irwan Tahir, 2012, Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 38.

M. Iwan Satriawan, 2013, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2.

M. Zaini Harfi, 2016, Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 16, No. 3.

Muhammad Andre Nurdiansah, 2023, Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1.

Moch Edward, Azka Abadi, 2020, Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa, Jurnal Antikorupsi, Vol. 6, No. 1.

Ramli, 2020, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Komunikasi, Vol. 2, No. 2.

Riza Multazam Luthfy, 2019, Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 4.

Rizki Zakariya, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi, Jurnal Artikorupsi, Vol. 6, No. 2.

Sandy Mulia Ardhan, 2023, Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2.

Sherly Danti Suharmartha, Syamsir dan Eriton, 2023, Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 3, No. 2.

Silvia Sinegal, Gustaaf B. Tampi dan Novva N. Plangiten, 2019, Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tempok Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 83.

Sri Soemantri, 1996, Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 3, No. 3.

Tjoe Kang Long dan Widyawanti Boediningsih, 2023, Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 2, No. 4.

Winda Wijayanti, 2013, Ekstistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat (Analisis Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012), Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1.

Yogi Setya Permana, 2010, Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14, No. 1.

Yohanis Ndoda, 2021, Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, Jurnal Moderat, Vol. 7, No. 3.

Yusril Fauzi Hasibuan dan Nora Susilawati, 2023, Faktor Penyebab Konflik Sosial Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Huluhupas Kabupaten Padang Lawas Utara, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1.

Zainal, 2016, Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1979-2015), Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 2, No. 1.

E. Skripsi

Djihhan Patarioja, 2019, *Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Sulawesi Selatan.

Etik Takrariah, 2016, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

Ninda Risdavianing Putri, 2023, *Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Jabatan Kepala Desa*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.

Risti Yuli Prawesti, 2018, *Kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Rosfa Nur Azizah, 2017, *“Strategi Optimalisasi Pembanguann Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Wahyu Haekal Fikri, 2022, *Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Yudi Riskiawan, 2023, *Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Skripsi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.

F. Tesis

Dasril, 1997, *Aspek Hukum tanah Kas Desa (TKD) dalam Sistem UUPA dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari*, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ibnu Sam Widodo, 2008, *Pengujian Materiil Peraturan Desa*, Tesis Universitas Indonesia, Depok.

Nur Laely, 2019, *Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Onderafdeling Bothain 1905-1942*, Tesis Universitas Negeri Makassar, Makassar.

G. Website

Ahmed Kurnia, 2023, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Harus Sesuai dengan UU*, <https://www.infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-harus-sesuai-uu>.

Berkas DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371>,

Noor Faaizah, 2023, *7 Pengertian Kepala Desa Menurut Para Ahli*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>.

Pudjio Santoso, 2018, *Problematika Penerapan UU No. 6/2014 tentang Desa*, <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/problematika-penerapan-uu-no-62014-tentang-desa-pudjio-santoso/>.

Putu Indah Savitri, 2023, *Panja RUU Desa DPR Sepakati Masa Jabatan Kades 9 Tahun 2 Periode*, <https://www.antaranews.com/berita/3616215/panja-ruu-des-dpr-sepakati-masa-jabatan-kades-9-tahun-untuk-2-periode>.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, 2022, *Oknum Kades Korupsi Dana Desa Rp 1,5 Milliar*, https://kalbar.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2022/03/2022_KLI_KB_SUA_R2603_01.

Utami Argawati, 2023, *Menguji Masa Jabatan Kepala Desa*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>.

Willy Medi Christian Nababan, 2023, *Rawan Dikorupsi Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-des-harus-diperkuat>.

Zamrotun Solichah, 2023, *Efektifkah Perpanjangan Masa Jabatan Kades Untuk Kemakmuran Rakyat*, <https://jatim.antaranews.com/berita/674265/efektifkah-perpanjangan-masa-jabatan-kades-untuk-kemakmuran-rakyat>.



